
Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Maulana Istu Pradika

Pusat Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM
Email: maulanapradika@gmail.com

Sri Rum Giyarsih

Fakultas Geografi UGM
Email: rum_ugm@yahoo.co.uk

Hartono

Fakultas Geografi UGM
Email: hartono.geografi@ugm.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research were to analyzed the role of youth in disaster risk reduction in Kepuharjo, and to analyzed the implications of the role of youth in disaster risk reduction to regional resilience in Kepuharjo.

This research was qualitative descriptive exposure. The approach of research was a study on the problems occurred in the community. Data collection using observation, in-depth interviews, documentary studies, and literature studies.

The results showed that the youth play an active role in disaster risk reduction in Kepuharjo through several activities undertaken collaboratively with other elements of society, such as socialization and training on disaster risk reduction, participatory mapping, monitoring and communications, simulation, community radio, and conservation and preservation.

The role played by the youth in disaster risk reduction had some implications for the resiliency in Kepuharjo. Based on the five indicators HFA, four (4) indicators implicated were (1). Disaster risk reduction as a priority at local and national levels, (2). Identifying, assessing and monitoring disaster risks, (3). Using knowledge, innovation and education to developed a culture of safety and resilience, and (4). Strengthening disaster preparation. There was no implication in fundamental risk factors reduction indicator for regional resiliency by the role of youth. Kepuharjo resiliency into the level 4, which was quite significant achievements had been obtained, but acknowledged that there were limitations to the commitment, financial resources or operational capacity.

Keywords: The Role of Youth, Disaster Risk Reduction, Regional Resilience.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana di Desa Kepuharjo, dan menganalisis implikasi peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana terhadap ketahanan wilayah di Desa Kepuharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pada suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini mengguakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di Desa Kepuharjo, yaitu melalui sosialisasi dan pelatihan PRB, pemetaan partisipatif, pemantauan dan komunikasi, simulasi, radio komunitas, dan konservasi dan pelestarian.

Peran yang dilakukan oleh pemuda dalam pengurangan risiko bencana memiliki implikasi terhadap ketahanan wilayah Desa Kepuharjo. Dari kelima indikator HFA, telah tercipta implikasi pada 4 (empat) indikator, yaitu (1). Pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas lokal dan nasional, (2). Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana, (3). Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun/mengembangkan budaya keselamatan dan ketahanan, dan (4). Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana. Pada indikator mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar, belum tercipta implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah Desa Kepuharjo masuk ke dalam level 4, yaitu capaian yang cukup berarti telah diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional.

Kata Kunci: Peran Pemuda, Pengurangan Risiko Bencana, Ketahanan Wilayah.

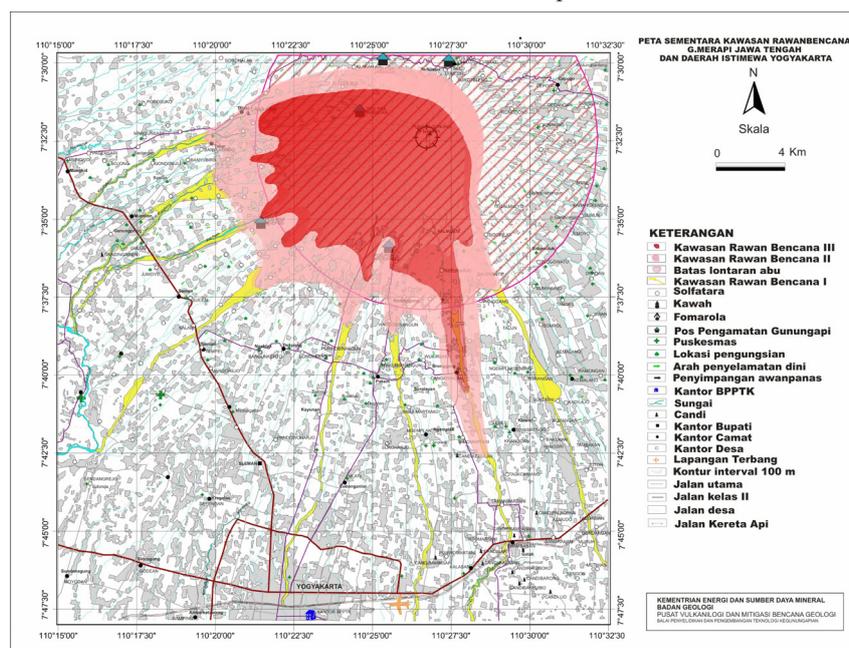
PENGANTAR

Kepulauan Indonesia berada di kawasan yang merupakan pertemuan dari lempeng-lempeng bumi yang sangat aktif. Posisi pertemuan lempeng yang aktif ini menjadikan adanya spektrum topografi dan bathimetri yang luas dan beragam dari kepulauan Indonesia, serta aktivitas kegempaan dan kegunungpian yang juga cukup tinggi. Persoalan ini mengakibatkan wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam seperti

gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, longsor, kekeringan, angin kencang dan penurunan tanah (Sudibyakto, 2011).

Dari sekian banyak gunung berapi, salah satu yang sangat aktif adalah Gunung Merapi yang posisinya terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung Merapi memberikan ancaman yang dapat menyebabkan bencana pada periode waktu tertentu (Sudibyakto, dkk, 2009). Ancaman utama Gunung Merapi adalah berupa

Gambar 1
Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi Tahun 2010



Sumber: geospasial.bnpb.go.id

awan panas (*wedhus gembel*) yang dapat menjangkau dengan sangat cepat wilayah pemukiman penduduk sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Erupsi Merapi pada tahun 2010 memberi dampak yang cukup signifikan. Terjadi gelombang pengungsian terbesar, jumlah pengungsi mencapai 400.000 orang. Perluasan tingkat radius bahaya yang bermula dari hitungan 5, 10, 15 hingga 20 km, lihat gambar 1 (Widyanta, 2010).

Letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunamimerupakan bencana yang terjadi karena faktor alam. Persoalan pada bencana karena faktor alam adalah belum ditemukan suatu alat yang mampu untuk memprediksi waktu bencana alam tersebut akan terjadi, sehingga yang dapat diketahui hanya sebatas potensi dan dampak yang akan ditimbulkan. Dari pengetahuan ini, maka pengurangan risiko bencana sangat penting untuk dilakukan, baik dari pengetahuan potensi ancaman bencana maupun riwayat bencana, sehingga manusia dapat melakukan pemetaan terkait risiko dan pada akhirnya dapat melakukan pengurangan risiko bencana (Sudibyakto dkk, 2009).

Kabupaten Sleman merupakan lokasi yang mengalami kerugian ekonomi paling parah dibandingkan tiga kabupaten lainnya. Lokasi yang terdampak langsung erupsi Gunung Merapi salah satunya adalah Kecamatan Cangkringan (BNPB, 2010). Kecamatan Cangkringan merupakan bagian dari Kabupaten Sleman yang terdiri dari 5 desa, yaitu Kepuharjo, Umbulharjo, Wukirsari, Argomulyo dan Glagahharjo (Nugrahani, 2011). Salah satu desa yang terdampak parah erupsi adalah Desa Kepuharjo yang menjadi objek penelitian. Kepuharjo terletak di antara Desa Umbulharjo di sebelah barat dan Glagahharjo di sebelah timur yang juga termasuk dalam kawasan rawan bencana

tingkat dua (KRB II) sehingga mempunyai potensi terdampak yang cukup besar.

Dari berbagai potensi bencana yang telah dijelaskan di atas, maka salah satu upaya dalam membentuk ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah dengan menggiatkan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memperkuat modal sosial sehingga dapat menjadi kekuatan internal dan semakin berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana secara mandiri. Salah satu elemen masyarakat yang sangat berperan penting dalam kegiatan pengurangan risiko bencana adalah sektor pemuda. Di banyak negara telah menjadikan pemuda sebagai aktor yang berperan penting dalam pengurangan risiko bencana karena dianggap sangat efektif dengan cara yang pragmatis. Shofa (2016) menjelaskan bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai dari keberadaannya melukiskan kemajuan suatu bangsa. Sekarang ini adalah situasi di mana harus berkonsentrasi pada langkah-langkah pencegahan yang dapat dirintis oleh generasi muda sebagai penggerak masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana di Desa Kepuharjo, dan menganalisis implikasi peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana terhadap ketahanan wilayah di Desa Kepuharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pada suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Prosedur teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

Peran aktif masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah yang mempunyai kerentanan tinggi terhadap bencana memang sangat penting. Bencana tidak dapat dihindari, tetapi dapat dipelajari penyebab dan risiko-risikonya. Saat ini bencana bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, namun sesuatu kondisi dimana masyarakat harus hidup sadar, siaga dan berdampingan dengan bencana. Hal ini dapat dicapai ketika masyarakat mampu membuat sebuah model pengurangan risiko bencana yang dapat digunakan sebagai acuan ketika menghadapi bencana. Terdapat enam teori dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengarahkan peneliti agar mudah untuk melakukan penelitian. Adapun teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, teori tentang peran. Dalam penelitian ini peran adalah tindakan dan tingkah laku yang mempunyai pola dimana hal tersebut terdapat pada status sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut meliputi hak, kewajiban, harapan-harapan, norma dan tingkah laku. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam keadaan suatu status tertentu.

Kedua, teori tentang pemuda yang dapat dilihat pada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, yaitu seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16 sampai 30 tahun, yang secara fisik mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang mengalami masa perkembangan emosional,

sehingga pemuda merupakan konsep yang dibentuk oleh nilai.

Ketiga, tentang pengurangan risiko bencana, yaitu konsep dan praktek dalam mengurangi dampak dari bencana yang akan terjadi melalui upaya-upaya dengan cara sistematis untuk menganalisis dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.

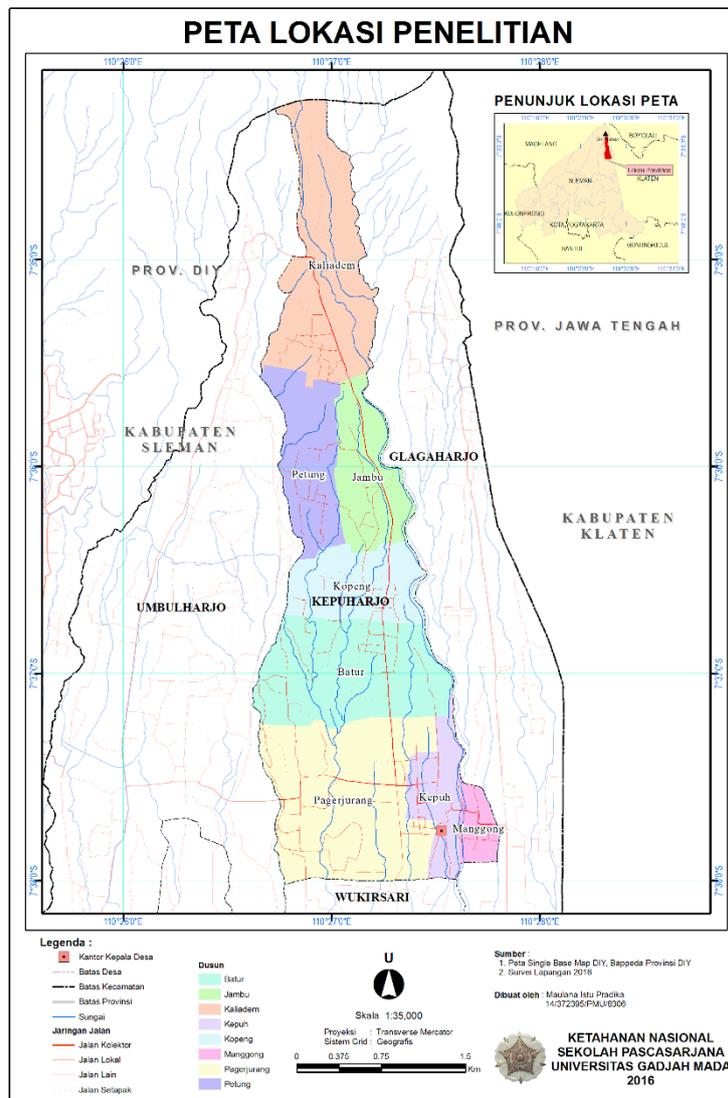
Keempat, ketahanan wilayah terhadap bencana adalah ketangguhan masyarakat daerah dalam mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar dalam kehidupan sosial sehingga dapat membangun kehidupan menjadi normal kembali pasca kerusakan dengan cepat. Tingkat ketahanan wilayah suatu daerah dapat dianalisis dengan menggunakan *Hyogo Framework for Action* (HFA) atau Kerangka Aksi Hyogo, yang kemudian dihubungkan dengan unsur *Asta Gatra* dalam dimensi ketahanan nasional. HFA memuat lima prioritas aksi yang menjadi komitmen negara penandatanganan dalam pengurangan risiko bencana (LIPI-UN-ISDR, 2007/Peraturan Kepala BNPB No. 03 Tahun 2012).

PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Desa Kepuharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cangkringan yang terletak di bagian utara. Desa Kepuharjo berada sekitar 7 km ke arah utara dari Kecamatan Cangkringan dan 27 km ke arah timur laut dari ibukota Kabupaten Sleman. Wilayah Desa Kepuharjo secara geografis berada di koordinat 07040'42.7" IS. 07043'00.9" LS dan 110027'59.9" BT – 110028'51.4" BT (Profil Desa Kepuharjo, 2012). Ketinggian wilayah Kepuharjo berada pada 600 -1200 m ketinggian dari permukaan air laut dengan

Gambar 2
Peta Lokasi Penelitian



Sumber: Peneliti, 2016

curah hujan rata-rata 2500 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 16-170C. Batas administrasi Desa Kepuharjo sebelah utara adalah Taman Nasional Gunung Merapi, sebelah timur adalah Desa Glagaharjo, sebelah selatan adalah Desa Wukirsaridan sebelah barat adalah Desa Umbulharjo. Desa Kepuharjo mempunyai luas wilayah sekitar 875 Ha. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 2 jenis peruntukan lahan, yaitu lahan terbangun (pekarangan) dan lahan

tidak terbangun. Peruntukan lahan yang mendominasi di Desa Kepuharjo adalah sebagai lahan tidak terbangun (gambar2).

Analisis Bahaya dan Kerentanan Desa Kepuharjo

Bahaya menurut UNISDR tahun 2014 dalam *Hyogo Frameworkfor Action* merupakan kejadian yang berpotensi mengancam aspek fisik dan segala fenomena atas aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa,

kehilangan kekayaan, dan gangguan sosial ekonomi atau degradasi lingkungan. Aktivitas Gunungapi Merapi mampu menimbulkan bahaya jika telah mengeluarkan material gunungapi. Keluaran material gunungapi disebabkan oleh pergolakan dapur magma sehingga gunungapi akan mengalami erupsi proses dan hasil erupsi dapat menimbulkan bahaya erupsi gunungapi, (lihat tabel 1).

Desa Kepuharjo termasuk dalam kawasan area terdampak langsung (ATL), kawasan rawan bencana III dan kawasan rawan bencana II (BPPTK, 2011). Area terdampak langsung di Desa Kepuharjo mencakup daerah seluas 332,3 ha, meliputi Dusun Petung, Jambu, Kopeng, dan Dusun Kaliadem. Wilayah Kepuharjo juga meliputi kawasan rawan bencana III (KRB III) seluas 252,3 ha. KRB III merupakan wilayah yang sering terkena awan panas (*wedhus gembel*), aliran lava guguran batu (pijar), dan gas beracun secara langsung (primer). Kawasan rawan bencana III Desa Kepuharjo berada pada jarak kurang lebih 5- 6 km dari puncak gunungapi pada bagian utara ke selatan sepanjang desa pada bagian timur. Desa Kepuharjo dilalui oleh Sungai Gendol sebelah timur dan Sungai Opak sebelah barat. Topografi wilayahnya landai hingga bergunung dengan kemiringan lereng 3 -8% (sebagian besar) samapi > 40% sebagian

kecil pada bagianutara desa. Lokasinya yang dekat dengan Gunungapi Merapi dan dilalui oleh Sungai Gendol menyebabkan Desa Kepuharjo memiliki kerawanan tinggi terhadap erupsi Merapi. Sebagian Dusun Batur dan Pagerjurang termasuk dalam kawasan rawan bencana II (199,62 ha). Kedua bagian dusun tersebut memiliki jarak terjauh dari kawah dan sungai dibandingkan dengan dusun lain di Kepuharjo. Bahaya yang mengancam KRB III dan II hampir sama, namun intensitas dan *magnitude* bahaya pada kedua kawasan tersebut berbeda. Dapat dikatakan KRB III jauh lebih sering terkena bahaya tersebut ketika terjadi erupsi gunungapi. Sedangkan KRB II memiliki potensi bahaya yang sama namun tidak sering atau intensitasnya yang jauh lebih kecil.

Keberadaan Pemuda Desa Kepuharjo

Pemuda-pemuda di Desa Kepuharjo memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun ada yang menyatukan mereka yaitu bahwa sama-sama hidup dan tinggal di daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi, sehingga muncul berbagai macam kelompok dengan peran, fungsi dan minat masing-masing tetapi tetap dalam kerangka pengurangan risiko bencana. Berikut organisasi-organisasi yang aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di Desa Kepuharjo.

Tabel 1
Jenis Bahaya Di Desa Kepuharjo

No	Jenis Bahaya	Karakter
1	Hujan abu vulkanik, kerikil, dan pasir	Abu vulkanik bersifat halus dan runcing dan mengandung silika (bahan pembuat kaca)
2	Gas beracun	Berbau tapi tidak nampak mata
3	Awan panas	Awan panas bergerak sangat cepat (150 – 200 km/jam) dan bersuhu sangat panas (600 – 12000 Celcius). Endapan awan panas
4	Lelehan lava	Lelehan lava yang keluar dari kawah gunung bersuhu tinggi (700 – 12000 Celcius) bersifat pekat, panas
5	Lahar erupsi	Lahar adalah campuran batuan dan air yang mengalir dari kawah kemudian menuruni lereng gunung berapi dan ata lembah-lembah sungai. Lahar ada yang panas dan ada yang dingin. Material yang terbawa didalam lahar berupa material berukuran butir lempung sampai bongkah dengan diameter leih dari 10 meter.

Sumber: Survei dan analisis, 2016

Pertama, Karang Taruna Desa Kepuharjo. Seperti halnya di tempat lain, karang taruna adalah organisasi kepemudaan yang berada di wilayah desa/kelurahan. Karang taruna merupakan tempat pengembangan diri generasi muda yang didasarkan padakesadaran dan rasa tanggungjawab sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan, karang taruna menjadi wadah dalam membina dan memberdayakan pemuda pemudi, termasuk di dalamnya terkait pengurangan risiko bencana. Mengingat Kepuharjo terletak di kawasan rawan bencana, maka karang taruna Desa Kepuharjo mempunyai fokus yang lebih banyak kepada pengurangan risiko bencana.

Kedua, Saluran Komunikasi Sosial Bersama (SKSB). SKSB merupakan singkatan dari Saluran Komunikasi Sosial Bersama. SKSB adalah sebuah kelompok masyarakat yang ada di Desa Kepuharjo yang terdiri atas inisiatif pemuda Desa Kepuharjo yang peduli atau sadar akan kebencanaan. SKSB berdiri pada waktu erupsi Merapi Tahun 2006 yang mana pada waktu itu sudah nampak antusiasme dari kepedulian warga masyarakat itu untuk membantu yang ada di pegunungan. Pada saat itu terdapat sedikit kendala dalam koordinasi dan pembagian pekerjaan di barak pengungsian, akhirnya dari beberapa pemikiran ada inisiatif untuk membentuk kelompok relawan Kepuharjo dengan satu komando yang akhirnya berdirilah SKSB. Kerjasama dengan BPBD yaitu berupa pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana (PRB). Di samping itu SKSB menjalin kerjasama juga dengan relawan SAR dari BPBD. Komunikasi juga dilakukan dengan BPPTK DIY serta pos PGM (Pengamat Gunung Merapi). Hal tersebut dikarenakan fokus SKSB adalah penyelamatan warga dari bencana.

Ketiga, Radio Komunitas (Rakom) Gema Merapi. Radio Komunitas Gema Merapi merupakan salah satu radio komunikasi yang ada di Desa Kepuharjo yang berfokus pada siaran-siaran mengenai Merapi. Radio Gema Merapi terbentuk atas inisiatif dari beberapa warga sekitar kawasan Merapi untuk membangun komunikasi berwadah radio komunitas. Rakom Merapi mulai terbentuk dari tahun 2011 pasca erupsi merapi 2010 dengan keadaan darurat di barak pengungsian Wukirsari oleh pemuda Kepuharjo dan dibantu oleh kelompok-kelompok relawan. Rakom Gema Merapi sendiri keanggotaannya sebagian besar adalah dari pemuda atau kelompok karangtaruna. Slogan dari Rakom Gema Merapi adalah “Berdaya, berbudaya dan tetap tangguh”. Sedangkan visi dari Rakom Gema Merapi adalah bersama melangkah dalam aksi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Keempat, FPL Palem. Forum Pecinta Lingkungan Lereng Merapi atau biasa disebut FPL Palem merupakan organisasi yang berbasis pada pelestarian lingkungan di Kawasan Merapi pada khususnya. FPL Palem berdiri resmi di Desa Kepuharjo pada tahun 2004. Yang mendasari terbentuknya FPL Palem yaitu melihat kondisi alam di Desa Kepuharjo khususnya dan kawasan sekitar Merapi umumnya. Pada awalnya konsentrasi dari FPL Palem adalah kepada konservasi dan penyelamatan lingkungan di hutan-hutan yang ada di Merapi, baik hutan rakyat maupun hutan negara yaitu TNGM (Taman Nasional Gunung Merapi). Namun semenjak erupsi 2010 selain berfokus pada masalah konservasi, forum ini juga bergerak di bidang kebencanaan.

Kelima, Kelompok Relawan SAR dan Tagana. Perkembangan relawan di Desa Kepuharjo sangatlah pesat pasca erupsi

Merapi 2006. Pada awal tahun 2000-an sudah muncul adanya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli bencana. Pasca 2010 dan terbentuk BPBD Kabupaten Sleman, antusias masyarakat untuk menjadi relawan SAR sangat besar. Untuk relawan Tagana (Taruna Tangguh Bencana) di Desa Kepuharjo, berada di bawah Tagana Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Saat ini semua desa di Kabupaten Sleman terdapat relawan SAR maupun Tagana.

Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana

Peran pemuda dalam pengurangan Risiko bencana di Desa Kepuharjo dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, sosialisasi dan pelatihan PRB. Pengorganisasian peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana di Desa Kepuharjo diposisikan sebagai bentuk kerja bersama secara kolaboratif antara tokoh pemuda itu sendiri ataupun organisasi pemuda, masyarakat yang didampingi, dunia swasta/usaha, dan pemerintah dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dan aman terhadap ancaman bencana. Peran kolaboratif pemuda yang pertama adalah sosialisasi dan pelatihan pengurangan risiko bencana. Sebagai desa tangguh bencana, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan sudah menjadi makanan sehari-hari di Kepuharjo, terlebih lagi banyak pihak luar yang ingin memberikan bantuan maupun ingin mengadakan penelitian terkait pengurangan risiko bencana mengingat dampak erupsi 2010 yang sangat besar yang menyebabkan Desa Kepuharjo menjadi tujuan utama.

Peran karang taruna Desa Kepuharjo sebagai organisasi kepemudaan sangat besar dalam sosialisasi dan pelatihan pengurangan

risiko bencana, karena mempunyai akses yang lebih mudah dan dekat dengan pemerintah desa. Karang taruna desa mempunyai peran strategis dalam pengorganisasian kegiatan dan mobilisasi sumber daya pemuda dalam serangkaian kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan-pelatihan baik untuk meningkatkan kapasitas pemuda sendiri maupun untuk masyarakat.

Akses yang mudah dalam mobilisasi sumber daya pemuda menjadi keunggulan dalam penyebaran informasi terkait kegiatan yang dilakukan. Karang taruna desa menjadi semacam koordinator dari tiap-tiap karang taruna dusun. Setiap karang taruna dusun mempunyai kegiatan yang lebih aktif karena mempunyai akses terdekat dan langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Sesuai dengan indikator renstra BPBD Sleman yang disampaikan oleh Kepala Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Heru Saptono, bahwa penguatan kelembagaan menjadi faktor utama dalam pembentukan desa tangguh bencana. Di Desa Kepuharjo banyak terdapat komunitas pemuda yang aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana selain karang taruna, sehingga menjadi nilai tambah tersendiri.

Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan tidak semata-mata untuk memberi informasi kepada masyarakat tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan kapasitas pemuda sebagai aktor dalam pengurangan risiko bencana di Kepuharjo. Pemuda di Kepuharjo yang ikut aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana mayoritas tidak hanya ikut satu organisasi saja seperti karang taruna, tetapi juga aktif di organisasi yang lain seperti SKSB, Palem dan di radio komunitas, hal inilah yang memudahkan dalam penyaluran informasi dan mobilisasi sumber daya. Melalui tim siaga bencana desa

yang tergabung dalam FPRB desa, pemuda menjadi aktor penggerak yang dinamis, sehingga aset penting dalam kegiatan pengurangan risiko bencana ini harus dijaga motivasi dan semangatnya, baik diberi wadah yang luas maupun diberi dukungan moral yang tinggi.

Inti dari penguatan kelembagaan yang menjadi fokus dari BPBD Sleman adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pemuda dalam pengurangan risiko bencana di Desa Kepuharjo. Dengan menguatnya kapasitas pemuda maka secara otomatis penguatan lembaga pengurangan risiko bencana akan terwujud. Pemuda dalam level kelembagaan di Kepuharjo telah mampu berperan aktif dalam setiap kegiatan pengurangan risiko bencana, sehingga memunculkan aktor-aktor dalam membangun semangat pengurangan risiko bencana yang akan menularkan pengetahuannya di luar lembaga yang diikuti.

Selain masuk ke dalam tim siaga bencana desa, pemuda juga masuk ke dalam tim siaga bencana sekolah, di mana banyak juga pemuda di Kepuharjo yang masih menempuh pendidikan. Program sekolah siaga bencana sudah menjadi kewajiban di Cangkringan, hampir seluruh sekolah sudah mendapat label sebagai sekolah siaga bencana. Selain kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan di desa masing-masing, pemuda yang masih bersekolah juga mendapatkan peningkatan kapasitas di masing-masing sekolah.

Kedua, pemetaan partisipatif. Kerja kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemuda sebagai elemen masyarakat yang selanjutnya adalah pemetaan partisipatif dengan tujuan untuk menghasilkan visualisasi bahaya dan risiko bencana agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat Kepuharjo.

Produk dari kegiatan ini dapat berupa poster atau peta bahaya dan risiko bencana.

Pemetaan partisipatif merupakan salah satu sarana untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal berkomunikasi dengan berbagai pihak agar lebih mudah dipahami. Kegiatan pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk secara aktif berperan bersama memperhitungkan kembali potensi ancaman dan sumber daya yang dimiliki, serta mampu menilai kapasitas dan kerentanan yang ada. Pada intinya adalah yang dapat menolong masyarakat dari bencana adalah masyarakat itu sendiri, karena mereka yang jauh lebih paham akan daerahnya.

Pemetaan partisipatif dilakukan dalam proses pembentukan desa tangguh bencana oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa dengan menghadirkan fasilitator baik dari pemerintah kabupaten dan LSM. Dalam pemetaan ini, terlihat cukup jelas ke mana dan di mana posisi arah yang dituju apabila terjadi bencana. Peta ini kemudian disebar ke lokasi strategis di desa dan ke semua pihak baik aparat desa maupun dusun.

Ketiga, simulasi atau gladi lapangan. Berbagai acara simulasi pengurangan risiko bencana digalakkan, baik yang difasilitasi dinas-dinas pemerintahan daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok pemuda. Pembiasaan gladi lapangan ini diharapkan mampu mendewasakan masyarakat dengan tidak lagi menganggap bencana sebagai sesuatu yang menakutkan dan tidak bisa dihindari. Sebaliknya, kegiatan ini sebagai upaya dalam membiasakan diri untuk menjadikan bencana sebagai bagian dari kehidupan yang dihadapi bersama.

Terutama dengan SOP atau dokumen kontinjensi tangguh bencana yang telah

terbentuk harus dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat serta harus dinilai apakah sudah efektif atau belum, untuk itulah diperlukan sebuah simulasi untuk menggambarkan skenario bencana yang harus diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.

Sama dengan sosialisasi dan pelatihan, pelaksanaan simulasi juga merupakan kerja kolaboratif antara pemuda dengan elemen masyarakat lain yang difasilitasi pemerintah daerah, baik level desa sampai provinsi. Warjono sebagai ketua FPL Palem menjelaskan bahwa pemuda Palem mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam penanggulangan bencana di Kepuharjo. Palem merupakan embrio dari lahirnya komunitas-komunitas yang aktif dalam pengurangan risiko bencana di Kepuharjo, sehingga ketika pelaksanaan simulasi, pemuda Palem mempunyai porsi yang paling banyak.

Kegiatan simulasi ini merupakan salah satu upaya dalam menunjukkan eksistensi pemuda sebagai salah satu elemen penggerak, termasuk karang taruna Desa Kepuharjo. Meskipun dalam pelaksanaan simulasi, karang taruna hanya sekedar diundang atau dilibatkan saja, tetapi karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang mempunyai level koordinasi dan jaringan yang lebih dibandingkan yang lain. Peran ini diharapkan dapat memaksimalkan penyebaran informasi dan pengetahuan dengan koordinasi yang terstruktur demi peningkatan kapasitas pemuda.

Keempat, pemantauan dan komunikasi. Pemantauan dan komunikasi merupakan tugas dari komunitas SKSB. Saluran Komunikasi Sosial Bersama (SKSB) merupakan komunitas non profit di bidang kebencanaan yang mayoritas anggotanya adalah pemuda yang mempunyai hobi di bidang HT. Pemantauan

dilakukan dengan tujuan untuk memberi informasi yang lebih cepat kepada masyarakat agar dapat melakukan tindakan apa yang diperlukan lebih awal.

SKSB menjadi motor dalam pemantauan atau menjadi koordinator dan organisasi yang lain membantu menyebarluaskan informasi tersebut, baik ke masyarakat maupun ke instansi terkait pengambil kebijakan.

Komunikasi yang dilakukan antar lembaga tersebut sudah terintegrasi dan terstruktur. Ketika mengamati aktivitas yang membahayakan, maka anggota SKSB langsung menyebarkan keadaan tersebut melalui HT ke dalam dua jalur. Jalur yang pertama melakukan pelaporan kepada dinas atau instansi yang terkait yaitu BPBD Sleman sehingga dapat diketahui tindakan apa yang tepat untuk segera dilakukan. Jalur yang kedua memberi peringatan langsung kepada masyarakat melalui anggota yang tersebar di seluruh desa, oleh karena itu HT menjadi alat wajib yang harus dimiliki oleh setiap dusun dan mayoritas pemuda sudah mempunyai HT. Melalui penyebaran informasi ini, keluarga, kerabat dan tetangga dapat cepat tahu untuk meminimalkan korban seperti yang terjadi erupsi 2010, di mana sudah terlihat keefektifan dari koordinasi yang dilakukan sehingga korban yang terdampak di Kepuharjo paling sedikit dibanding desa lainnya.

Kelima, radio komunitas. Menariknya di Kepuharjo setiap komunitas pemuda mempunyai porsi masing-masing dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, masing-masing dapat mengambil celah dalam meluangkan peran dan minatnya, bagi yang tidak minat dengan komunitas HT tetapi mempunyai minat dalam *broadcasting* dapat aktif di radio komunitas Gema Merapi FM. Semangat untuk menjembatani komunikasi masyarakat lereng

merapi Kepuharjo tentang kebutuhan informasi berbagai hal terutama tentang segala aktivitas Gunung Merapi dan kondisi warganya. Tujuan utama radio komunitas Gema Merapi adalah menjadi motor penggerak pengurangan risiko bencana dengan memberikan informasi secara berimbang dan apa adanya.

Pemuda karang taruna desa menjadi pengelola radio komunitas ini dengan didampingi berbagai pihak pegiat radio komunitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan aktif pasca erupsi 2010, dengan melakukan banyak kegiatan *off-air* terlebih dahulu yaitu pelatihan pengurangan risiko bencana berbasis radio komunitas dan acara pengenalan pengurangan risiko bencana kepada anak-anak melalui perlombaan menggambar dan mewarnai.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan sebagai *trauma healing* dan memberikan gambaran tentang Gunung Merapi. Adanya program kerjasama dengan FMYY Kobe, Jepang dan LSM memberi manfaat yang cukup besar terhadap perkembangan radio komunitas Gema Merapi FM dalam pengurangan risiko bencana di Kepuharjo. Inti dari kerjasama ini adalah berbagi pengalaman belajar bersama bagaimana warga menghadapi ancaman bencana berbasis kekuatan komunitas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan *jingle* radio, dan memproduksi *Disaster Management Audio Material Program*. Program ini menceritakan kembali ingatan masyarakat tentang merapi baik bencana maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan merapi yang diproses menjadi audio sehingga dapat dinikmati melalui siaran radio. Tujuan dari kerja kolaboratif ini adalah agar cerita-cerita tentang merapi tidak terputus untuk generasi muda yang akan datang dan bisa memelajari pengalaman serta pengetahuan bersama.

Pada saat bencana terjadi, radio komunitas dapat menjadi sumber informasi dan berita bagaimana menyalurkan bantuan logistik, pencarian orang hilang, hingga penyembuhan trauma. Selain itu, yang lebih penting radio komunitas mampu membangun interaksi yang lebih hidup antara korban dengan orang-orang yang hendak memberikan bantuan, karena korban dapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan langsung apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Namun peran radio komunitas tidak berhenti saat bencana saja, justru peranannya terus berlangsung sampai bertahun-tahun usai bencana secara terus-menerus seperti sekarang. Harapan ke depan bahwa rakom ini dapat menjadi kendaraannya pemuda dalam pengurangan risiko bencana.

Keenam, konservasi dan pelestarian. Bentuk peran pemuda yang lain adalah konservasi dan pelestarian yang menjadi fokus utama dari FPL Palem. Konservasi dan pelestarian lereng Merapi menjadi hal yang sangat penting pasca erupsi Merapi yang membuat seluruh lahan hijau dan pohon-pohon keras hilang seketika, sehingga dapat memicu bencana sekunder yaitu kekeringan dan angin kencang. Dalam paradigma pengurangan risiko bencana konservasi dan pelestarian menjadi salah satu indikator untuk mengurangi faktor-faktor kerentanan.

Setiap organisasi di Kepuharjo mempunyai fokus dan tujuan masing-masing dalam kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Sebelum ada SKSB dan radio komunitas, pemuda Palem menjadi pelopor dalam serangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana dan pasca bencana di Kepuharjo.

Mereka mengawalinya dengan aksi langsung, semula dengan menggalakkan penanaman pohon di kawasan yang rusak

akibat erupsi dan selanjutnya rusak akibat maraknya penambangan batu dan pasir. Budaya menanam inilah yang terus-menerus digalakkan. Aksi ini melibatkan banyak elemen masyarakat yang sekaligus berfungsi strategis untuk mengambil hati masyarakat tentang pelestarian alam di lereng merapi. Virus kepedulian terhadap lingkungan ini terus-menerus mereka suntikkan, seiring dengan berbagai aksi sosial lain. Jika masyarakat sudah tertular virus kepedulian alam, maka aksi-aksi lain bisa mudah bermunculan, bahkan lahir atas inisiatif masyarakat.

Hasil dari kepedulian ini adalah ancaman sekunder akibat rusaknya alam di merapi yaitu susutnya mata air dan angin kencang dapat diatasi. Termasuk dalam kegiatan pengurangan risiko bencana yang lain, bahwa segala kegiatan yang dilakukan harus seiring dengan pelestarian alam.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo

Resiliensi atau ketahanan merujuk pada kemampuan individu, kelompok, termasuk masyarakat untuk menghadapi, mencegah, dan meminimalkan permasalahan yang mengganggu keadaan normal, bahkan menjadikan permasalahan menjadi bagian dari normalitas sehari-hari. Dalam konteks bencana, Abdullah (2008) sudah menjelaskan bahwa suatu bencana, karenanya, tidak harus mengganggu stabilitas, menyebabkan ketidak pastian, kekacauan atau runtuhnya sistem sosial budaya, merusak kemampuan adaptasi masyarakat, serta membahayakan sistem pandangan dunia. Melalui dasar inilah ketahanan suatu wilayah terhadap bencana harus diciptakan.

Pondasi ketahanan wilayah yang sedang dibangun di Desa Kepuharjo, komunitas

memainkan peranan sentral dalam keseluruhan wacana kebencanaan, sebab, masing-masing komunitas memiliki cara sendiri-sendiri dalam menghadapi bencana, tergantung pada karakter daerah, tatanan sosial budaya, dan berbagai faktor lain yang melekat di dalamnya. Tetapi, inti dari resiliensi tetap sama, sebagaimana dipaparkan Ride dan Bretherton (2011):

“resilience itu bertitik tolak pada bagaimana membangun kapasitas masyarakat dalam mengatasi keadaan darurat, terutama untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman sehingga struktur fisik, sosial, dan politik yang baru bisa selaras dengan kondisi lingkungan”.

Untuk mendorong ketahanan wilayah Desa Kepuharjo dalam konteks kebencanaan inilah, peranan pemuda akan dielaborasi, sebab sebagaimana diingatkan oleh Sirimorok (2010), bahwa partisipasi orang muda masih kabur dan cenderung mengekor pada konstruksi orang dewasa. Padahal, pemuda itu memendam cara tersendiri dalam memahami sekaligus melakukan suatu tindakan, tidak terkecuali dalam konteks kebencanaan.

Ada dua cara untuk memahami ketahanan wilayah terhadap bencana di dalam masyarakat Kepuharjo. *Pertama*, ketahanan yang dilihat dalam konteks saat ini, artinya mereka menyiapkan segala rancangan sistem prosedur yang membuat mereka dapat bertahan atau setidaknya meminimalisasi risiko jika terjadi bencana. *Kedua*, ketahanan yang dimaksudkan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ada beberapa aktivitas yang dikerjakan untuk merancang konsep pengurangan risiko bencana secara lebih visioner dalam rangka menyiapkan kehidupan generasi ke depan yang lebih baik (Sirimorok, dkk., 2010).

Peneliti menjawab rumusan masalah kedua yakni implikasi peran pemuda dalam

pengurangan risiko bencana terhadap ketahanan wilayah Kepuharjo menggunakan prioritas aksi yang dihasilkan dari *Hyogo Framework for Action (HFA)*. Tingkat ketahanan wilayah suatu daerah dapat dianalisis dengan menggunakan HFA yang memuat 5 (lima) prioritas aksi yang menjadi komitmen negara penandatangan dalam pengurangan risiko bencana.

Pertama, prioritas lokal dan nasional. Puncak penghargaan dunia untuk Indonesia dalam menjadikan pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional itu mulai berwujud dari penghargaan dunia atas keberhasilan upaya pengurangan dampak bencana kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penghargaan Sawakawa Laureate kepada Eko Teguh Paripurno (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta) dari UNISDR, hingga penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah *The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR)* pada Oktober 2012. AMCDRR kali ini merupakan konferensi se-Asia-Pasifik yang dianggap paling berhasil karena dihadiri paling banyak pejabat menteri (dua puluh empat menteri se-Asia), yang dibandingkan pergelaran sebelumnya. Dalam AMCDRR ini, dihasilkanlah *Yogyakarta Declaration* yang berisi ide untuk menempatkan komunitas sebagai investasi utama penanggulangan bencana. Seruan investasi ini dapat dianggap sebagai pesta besar bagi negara kawasan Asia-Pasifik, termasuk juga Indonesia.

Deklarasi yang telah dihasilkan tersebut membuat Yogyakarta bekerja ekstra untuk membangun sebuah manajemen pengurangan risiko bencana di tingkat lokal. Terlebih lagi melalui pengalaman Yogyakarta dalam gempa 2006 dan erupsi Merapi 2010 menjadikan

Yogyakarta menjadi rujukan belajar dalam hal pengurangan risiko bencana. Kabupaten Sleman melalui BPBD Sleman terus gencar dalam melaksanakan amanat renstra BPBD yaitu penguatan kelembagaan bencana pada level desa di kawasan rawan bencana merapi, termasuk di dalamnya Desa Kepuharjo. Dalam penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana Desa Kepuharjo tersebut diharuskan menyusun dokumen kontinjensi yang dituangkan dalam *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pada awal tahun 2012 di Desa Kepuharjo sudah memprogramkan adanya SOP per dusun yang kemudian akan dijadikan dasar menjadi rencana kontinjensi desa. SOP adalah untuk memberikan kejelasan tugas dan peran masing-masing satuan organisasi perangkat daerah dalam rangka penanggulangan bencana. SOP direncanakan untuk persiapan menghadapi bencana dan akan diaktifkan pada saat merapi dalam kondisi siaga.

Dalam penyusunan dokumen kontinjensi yang pertama harus dilakukan adalah mengenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Pertemuan-pertemuan yang dijumpai oleh BPBD Sleman banyak dilakukan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pengurangan risiko bencana. Pertemuan ini bersifat kolaboratif melibatkan seluruh elemen masyarakat yang didalamnya tergabung kelompok-kelompok pemuda yang aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana seperti karang taruna, SKSB dan Palem di Desa Kepuharjo.

Berdasarkan indikator yang pertama yaitu prioritas lokal dan nasional disimpulkan bahwa peran pemuda dalam

pengurangan risiko bencana berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Desa Kepuharjo dengan bentuk positif berupa: (1). Ada rasa tanggungjawab bersama dalam pengurangan risiko bencana, (2). Sumber daya manusia pemuda dapat dimaksimalkan dan terarah dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, (3). Banyak dukungan dari akademisi, LSM dan pemerintah dalam mendukung pengurangan risiko bencana sehingga membuat semakin maraknya dialog dan penelitian yang melibatkan pemuda.

Kedua, mengidentifikasi risiko-risiko bencana. Indikator yang kedua adalah mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda secara kolaboratif yang berkaitan dengan mengidentifikasi risiko-risiko bencana adalah sosialisasi dan pelatihan, pemetaan partisipatif, pemantauan dan penyebaran informasi, komunikasi

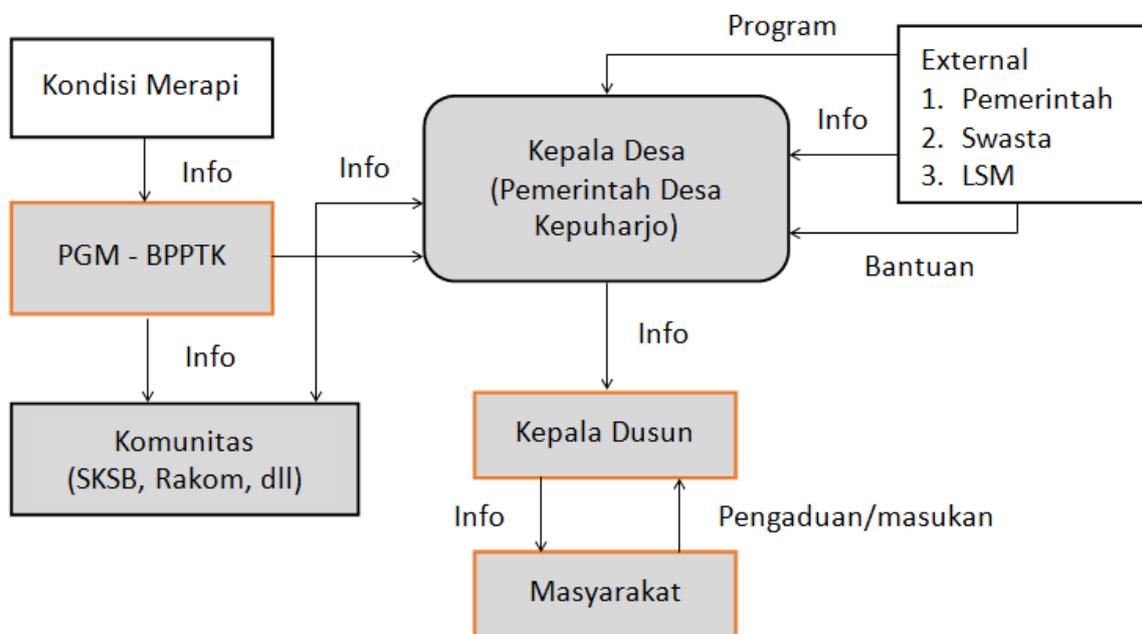
Keempat kerja kolaboratif yang dilakukan tersebut saling berkaitan dan saling berdampak satu sama lain. Pelatihan pengurangan risiko bencana dilakukan untuk meningkatkan kapasitas baik aktor pemuda maupun warga yang berpotensi terdampak. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan berisi pengetahuan dan informasi tentang kebencanaan yang spesifik berhubungan dengan lokasi tempat tinggal. Baik tentang bagaimana mengidentifikasi bahaya dan kerentanan yang ada di Kepuharjo serta mengelola kapasitas yang tersedia di masing-masing kelompok.

Penilaian risiko dapat dianalisis dan dicari penanggulangannya dari perhitungan bobot masing-masing variabel yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dengan penambahan pengetahuan tentang bagaimana mengelola

risiko dan dampaknya, maka akan lebih mudah untuk melakukan pemetaan partisipatif. Dampak positif terhadap ketahanan wilayah dengan adanya kegiatan pemetaan partisipatif adalah menciptakan sajian komunikasi yang dapat lebih dimengerti oleh masyarakat dan lebih akurat sehingga lebih tepat sasaran. Masyarakat sendiri lah yang lebih paham akan kondisi tempat tinggalnya. Kegiatan pemetaan partisipatif meliputi identifikasi data bahaya dan informasi kerentanan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko bencana yang mungkin akan terjadi sehingga proses meminimalkan korban dapat terwujud. Dengan kata lain pemetaan ini adalah untuk memprediksi dampak yang akan terjadi sehingga para pihak dapat mengantisipasinya.

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk memberi informasi yang lebih cepat kepada masyarakat agar dapat melakukan tindakan apa yang diperlukan lebih awal. Pemantauan dibagi menjadi dua kegiatan kesiapsiagaan yaitu dalam menghadapi erupsi Merapi dan pengawasan alur sungai pada saat musim penghujan terutama pada Sungai Gendol yang melintasi Desa Kepuharjo. Dengan adanya pemantauan maka akan dapat diidentifikasi segala tanda-tanda bahaya dan risiko yang akan terjadi baik peningkatan aktivitas merapi maupun ancaman sekunder yaitu banjir lahar dingin, sehingga risiko dapat dikelola dengan rencana aksi yang telah disepakati dalam SOP. Kerja kolaboratif pemuda dalam pemantauan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan relawan SAR dari BPBD serta dengan BPPTK DIY serta pos PGM (Pengamat Gunung Merapi). Hal tersebut dikarenakan fokus pemantauan adalah penyelamatan warga dari bencana, namun kelompok pemantau mempunyai keterbatasan peralatan dan teknologi, yang mana alat-alat

Gambar 3
Sistem Informasi Desa Kepuharjo



Sumber: Analisis, 2016

tersebut dimiliki oleh BPPTK dan PGM. Dari kerjasama itu akan mendapatkan informasi mengenai keadaan Gunung Merapi yang bisa disampaikan pada anggota melalui HT dan kemudian disampaikan kepada masyarakat sesuai alur komunikasi.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran program pengurangan risiko bencana. Ketika membangun sebuah sistem manajemen bencana maka harus disusun pula mengenai sistem komunikasi. Komunikasi dilakukan untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan segala informasi tentang bahaya dan kerentanan utama. Pada dasarnya komunikasi tidak hanya dibutuhkan pada masa sebelum bencana saja, namun menyeluruh pada masa tanggap darurat serta masa pasca bencana. Sistem komunikasi di Desa Kepuharjo terbagi menjadi beberapa kelompok untuk mempermudah koordinasi meliputi: (1). Komunikasi pemerintah desa dengan pihak eksternal. Pihak pemerintah desa

merupakan gerbang utama masuknya bantuan atau program-program penanggulangan kebencanaan yang dibuat oleh pemerintah secara *top-down*. Pemerintah desa harus memperkuat komunikasi dengan pihak lainnya, misal dengan LSM, perguruan tinggi, swasta maupun lembaga lain. Komunikasi yang dimaksud adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik. (2). Komunikasi antar komunitas/kelompok pengurangan risiko bencana. Dalam perencanaan program-program bencana berbasis masyarakat, sangat diperlukan peran penting suatu komunitas yang bergerak di bidang kebencanaan. Komunitas merupakan jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Oleh karena itu perlu diperkuat komunikasi antar komunitas dengan pemerintah desa. Komunitas yang secara umum sebenarnya adalah beranggotakan masyarakat, mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat. (3).

Komunikasi masyarakat umum. Masyarakat umum yang dimaksud di sini adalah masyarakat desa Kepuharjo. Peran penting alat komunikasi HT (*Handy Talkie*) sangat besar yang saat ini telah banyak digunakan oleh warga Desa Kepuharjo. Hal tersebut merupakan modal yang kuat untuk membangun komunikasi antar warga, terutama saat kejadian bencana. Pada saat sebelum bencana perlu ada perencanaan penguatan cara komunikasi baik itu antar warga maupun warga dengan pemerintah desa. Selain menggunakan HT, saat ini masyarakat hampir semuanya sudah mempunyai HP, hal tersebut dapat menjadi penguat komunikasi antar warga. Alat lain yang digunakan sebagai komunikasi sekaligus tanda bahaya yaitu berupa sirine dan juga kentongan. Dengan mempunyai modal komunikasi, rasa persaudaraan, serta jaringan sosial yang kuat maka masyarakat mempunyai aset yang kuat untuk mengurangi risiko bencana di daerah penelitian. Berikut ini adalah bagian rencana sistem komunikasi di Desa Kepuharjo, (lihat gambar 3).

Berdasarkan indikator yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko-risiko bencana disimpulkan bahwa peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Desa Kepuharjo dengan dampak positif berupa: (1). Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang risiko bencana dan bagaimana mengantisipasinya, (2). Menciptakan peta sebagai alat informasi yang mudah dipahami, (3). Terlihat pada erupsi 2010 dimana korban yang ditimbulkan sangat sedikit karena sudah efektifnya mekanisme pemantauan dan komunikasi.

Ketiga, membangun budaya keselamatan dan ketahanan. Indikator ketahanan wilayah yang ketiga adalah menggunakan pengetahuan,

inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. Kegiatan yang dilakukan pemuda dalam hubungannya dengan membangun budaya sadar bencana adalah pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini adalah dalam upaya untuk membentuk ketahanan wilayah yang dibangun untuk kehidupan ke depan yang lebih harmonis.

Faktor pendidikan memang sangat penting, cara ini terbilang sangat vital karena di usia dinilah seorang anak akan menyerap informasi guna membangun kesadaran mereka. Dalam kaitannya dengan peran pemuda dalam pendidikan, siswa atau mahasiswa yang berasal dari Desa Kepuharjo akan menjadi aktor dan penggerak dalam pengurangan risiko bencana. Dari hasil penelitian, pemuda Kepuharjo yang menimba ilmu di perguruan tinggi menjadi aktor-aktor dan pengurus dalam kelompok pengurangan risiko bencana, yaitu karang taruna, Palem, SKSB dan rakom. Selain dari dalam pemuda Kepuharjo itu sendiri, dampak positif dari perguruan tinggi yang terlibat dalam isu-isu kebencanaan adalah banyaknya penelitian-penelitian yang mengambil Kepuharjo sebagai objeknya baik dari dosen maupun mahasiswa dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam, sehingga hasil dari penelitian tersebut semakin menambah khasanah pengetahuan dan informasi yang sangat berguna.

Selain dibentuk dalam dunia pendidikan, budaya keselamatan dan ketahanan juga dibentuk melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana yang sering diadakan oleh pemerintah dan LSM. Meskipun terkesan program pemerintah yang dilakukan berulang-ulang dan monoton, tetapi sebenarnya tujuan dari itu semua adalah pembiasaan dan penjagaan semangat motivasi.

Peran aktif dalam bentuk pendidikan juga dikerjakan oleh Rakom Gema Merapi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan aktif pasca erupsi 2010, dengan melakukan banyak kegiatan *off-air* terlebih dahulu yaitu pelatihan pengurangan risiko bencana berbasis radio komunitas dan acara pengenalan pengurangan risiko bencana kepada anak-anak melalui perlombaan menggambar dan mewarnai. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan sebagai *trauma healing* dan memberikan gambaran tentang Gunung Merapi dan apa yang sebaiknya dilakukan dalam menjaganya. Kemudian kegiatan *on-air* yang dilakukan yaitu lebih banyak menyampaikan informasi-informasi terkini tentang kondisi merapi disertai dengan pengetahuan pengurangan risiko bencana untuk memupuk budaya kesadaran dan keselamatan. *Broadcasting* yang dilakukan juga dihubungkan dengan komunitas SKSB untuk mendapat situasi yang akurat.

Berdasarkan indikator yang ketiga yaitu membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan disimpulkan bahwa peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Desa Kepuharjo dengan dampak positif berupa: (1). Semakin banyaknya aktor-aktor penggerak pemuda dalam pengurangan risiko bencana, (2). Semakin banyaknya sumber informasi dan pengetahuan yang dapat diakses, (3). Meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab bersama dalam membangun kemajuan desa dalam pengurangan risiko bencana.

Keempat, mengurangi faktor-faktor risiko mendasar. Indikator ketahanan wilayah terhadap bencana yang keempat yaitu mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar. Pencapaian dari indikator ini adalah risiko bencana yang terkait dengan berubahnya

kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dan penggunaan lahan, dan dampak bahaya dikaitkan dengan peristiwa geologis, cuaca, air, keragaman iklim dan perubahan iklim, semua ditangani dalam perencanaan dan program pembangunan sektor serta dalam situasi-situasi pasca bencana.

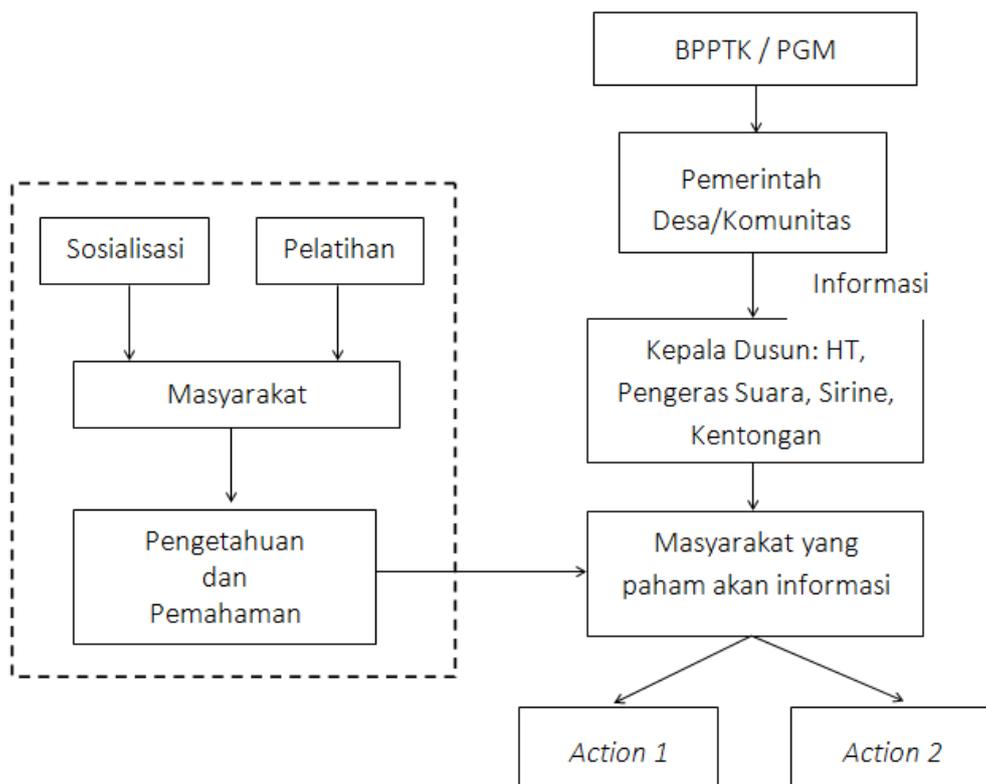
Salah satu bentuk peran pemuda yang berhubungan dengan mengurangi faktor-faktor risiko mendasar adalah konservasi dan pelestarian yang dikerjakan oleh FPL Palem. Dalam paradigma pengurangan risiko bencana konservasi dan pelestarian menjadi salah satu indikator penting untuk mengurangi faktor-faktor risiko dan termasuk dalam manifestasi dari semboyan hidup *nyawiji mrih lestari rengkung hing Merapi*. Risiko yang berakibat dari rusaknya hutan akibat erupsi dan penambangan pasir adalah kekeringan yang ditandai semakin susutnya debit mata air tiap tahunnya dan sering terjadi angin kencang. Mulai dari tahun 2011, setiap bulan FPL Palem mengadakan koordinasi dan pelatihan-pelatihan untuk pemulihan lahan yang terkena dampak dari erupsi Merapi 2010. Konsentrasi adalah pada hutan rakyat dan TNGM yang ada di Desa Kepuharjo. Jenisnya pun bermacam-macam, mulai dari pohon yang diambil kayunya sampai dengan pohon buah-buahan. Kerjasama dilakukan dengan pihak swasta dan pemerintah seperti Dinas Kehutanan DIY, Fakultas Kehutanan (UGM), sampai BPPTK DAS Solo (Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kehutanan Daerah Aliran Sungai).

Peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang kawasan rawan bencana merapi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Perpres tersebut menyebutkan

larangan pembangunan di lereng Gunung Merapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana baik KRBI, II, dan III. Pembangunan yang dimaksud dalam Perpres meliputi seluruh adanya kegiatan baik pembangunan fisik baru maupun perbaikan, baik untuk fasilitas umum maupun hunian. Penyediaan sarana prasarana dan kegiatan yang diperbolehkan adalah yang dilakukan untuk mendukung kelancaran evakuasi, yaitu alat penerangan, alat komunikasi, rambu evakuasi dan ruang terbuka. Rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan meningkatkan konservasi sumber daya air serta melindungi masyarakat dari risiko bencana.

Keluarnya Perpres ini membuat masyarakat Kepuharjo dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka sangat membutuhkan akses dan fasilitas untuk melakukan kegiatan perekonomian, tetapi jelas tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kebutuhan yang sangat mendesak dan dianggap lebih menguntungkan serta perasaan dalam kondisi aman membuat banyak warga yang tetap memaksa kembali untuk melakukan aktivitas perekonomian baik peternakan, maupun penambangan pasir di kawasan rawan bencana. Berdasarkan hasil penelitian, pasca erupsi 2010 justru perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Dapat membangun rumah mewah, sudah mempunyai mobil dan truk, dan peternakannya meningkat tinggi.

Gambar 4
Alur Peringatan Dini Dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Di Desa Kepuharjo



Sumber: Analisis, 2016

Berdasarkan indikator keempat yaitu mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar dapat disimpulkan bahwa peran pemuda belum berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kepuharjo. Pemuda telah berusaha melakukan konservasi dan pelestarian melalui penghijauan dan pendampingan, tetapi masih banyak kegiatan yang bersifat negatif, yaitu (1). Masih banyaknya kegiatan penambangan pasir dan batu yang tidak sesuai dengan peraturan, (2). Jaringan jalan yang seharusnya untuk jalur evakuasi menjadi rusak dan kurang terawatnya barak pengungsian, (3). Adanya tumpang tindih regulasi sehingga ada kegiatan yang melanggar terkait pembangunan di kawasan rawan bencana Merapi, (4). Kurangnya pengawasan dan ketegasan pemerintah. Melalui berbagai masalah yang belum menemukan penyelesaian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan dengan merapi belum tercipta. Kesadaran masyarakat lebih kepada faktor traumatik akibat erupsi 2010.

Kelima, memperkuat kesiapsiagaan. Indikator ketahanan wilayah terhadap bencana yang kelima adalah memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat. Salah satu bukti bahwa suatu daerah mempunyai tingkat ketahanan tinggi terhadap bencana adalah mempunyai unsur-unsur yang matang dalam merespon setiap bencana yang akan datang.

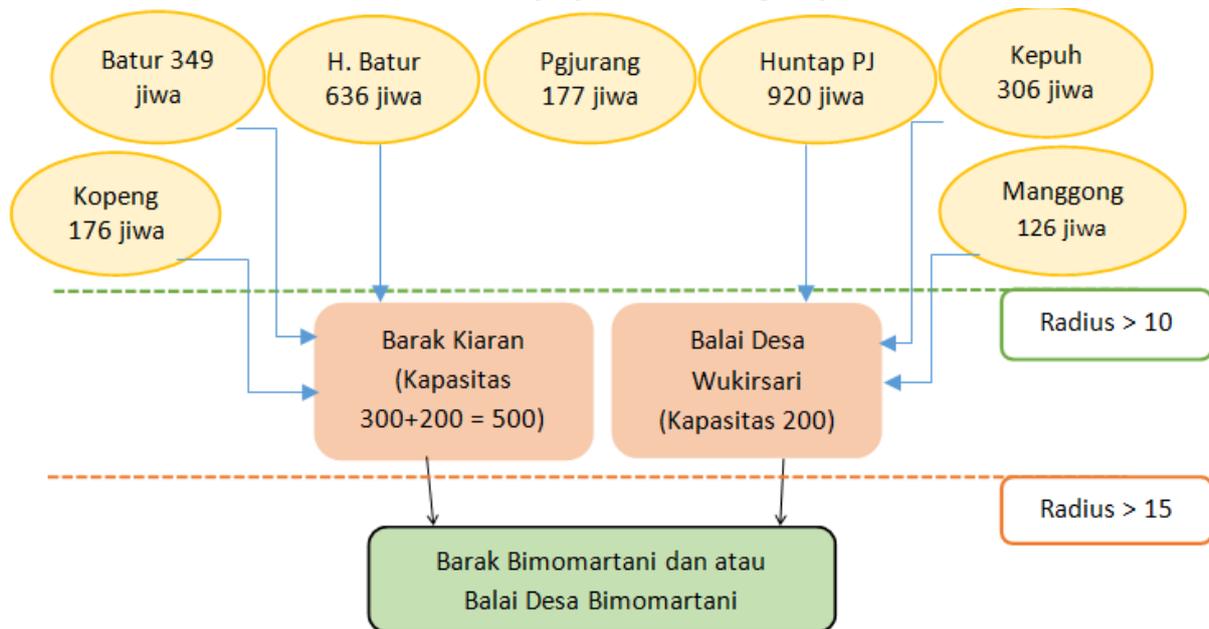
Dalam menganalisis indikator ini, peneliti menggunakan parameter yang dibuat oleh LIPI dan UNESCO yaitu, pengetahuan dan sikap/*knowledge and attitude*, kebijakan, perencanaan kedaruratan/*emergency planning*, sistem peringatan bencana/*early warning system* dan mobilisasi sumberdaya/*resource mobilization capacity*.

Pertama, pengetahuan dan sikap. Pengetahuan dan sikap didapat dari berbagai

macam kegiatan pelatihan dan simulasi atau gladi lapang. Latihan simulasi dan gladi teratur diadakan untuk menguji dan mengembangkan program tanggap bencana. Berbagai acara simulasi pengurangan risiko bencana digalakkan, baik yang difasilitasi dinas-dinas pemerintahan daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Pembiasaan simulasi ini menjadikan masyarakat tidak lagi menganggap bencana sebagai sesuatu yang menakutkan dari luar yang tidak bisa dihindari. Sebaliknya, mereka membiasakan diri untuk menjadikan bencana sebagai bagian dari kehidupan yang di hadapi bersama. Peningkatan pengetahuan dan sikap dalam masyarakat Kepuharjo dijalankan selaras dengan kearifan lokal. Peningkatan *knowledge* dan *attitude* masyarakat Kepuharjo dapat dilihat pada gambar 4.

Kedua, kebijakan. Salah satu parameter yang memegang peranan penting dalam mewujudkan kesiapsiagaan adalah kebijakan. Parameter ini menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan berbagai kegiatan baik di desa atau di sekolah dalam membentuk siaga bencana. Dalam parameter ini lebih menekankan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pembentukan desa siaga bencana dan sekolah siaga bencana. Pemuda hanya dilibatkan dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan program pembentukan tim siaga bencana di lapangan. Di Desa Kepuharjo telah tercapai kebijakan yang menanamkan kesiapsiagaan dalam program desa, yaitu (1). Masuknya materi kesiapsiagaan terhadap bencana dalam proses belajar mengajar di sekolah, (2). Adanya simulasi/latihan evakuasi bencana yang dilakukan di desa maupun di sekolah secara reguler, (3). Terbentuk tim siaga bencana desa dan tim siaga bencana sekolah, (4). Adanya alokasi dana untuk kegiatan kesiapsiagaan.

Gambar 5
Skenario Pengungsian Di Desa Kepuharjo



Sumber: BPBD Kabupaten Sleman, 2013

Ketiga, perencanaan kedaruratan. Penyelenggaraan program-program pengurangan risiko bencana pada suatu kawasan atau desa tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama yang baik dengan kawasan di sekitarnya. Guna menjamin adanya program pengurangan risiko bencana yang optimal maka perlu adanya pengelolaan dalam hal pelayanan terutama ketika terjadi bencana. Kerjasama pengurangan risiko bencana yang dimaksud yaitu merupakan perwujudan adanya hubungan pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya, dan atau pemerintah kecamatan yang lain meliputi hubungan kewenangan, pemanfaatan fasilitas umum, dan sumber daya lainnya, (lihat gambar 5).

Kerjasama antar desa tersebut perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelum terjadinya bencana. Perlu adanya kejelasan desa mengenai *sister village* atau pasangan desa, dimana terdapat desa terdampak dan desa penyangga. Yang dimaksud dengan desa terdampak adalah

desa yang terkena dampak akibat erupsi Merapi, sedangkan yang dimaksud dengan desa penyangga adalah desa yang bebas dari ancaman Merapi dan bisa menjadi desa tujuan evakuasi, maka masing-masing desa perlu melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pasangan desa untuk kemudian diadakan kerjasama.

Kepuharjo yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Desa Umbulharjo di sebelah Barat dan Desa Glagaharjo di sebelah timur, namun masing-masing dari desa tersebut juga merupakan desa yang masuk dalam KRB III dan KRB II. Desa yang berbatasan langsung di sebelah selatan yaitu Desa Wukirsari yang mana merupakan desa yang letaknya lebih jauh dari Gunung Merapi dibandingkan dengan Desa Kepuharjo. Oleh karena itu Desa Wukirsari merupakan salah satu desa yang dapat dijadikan desa tujuan evakuasi pertama dengan skenario pengungsian diatas radius 10 km. Dari gambar

di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Desa Wukirsari merupakan kawasan yang tidak rawan terhadap bencana dengan radius di atas 10 km dari puncak Merapi. Desa Wukirsari merupakan desa terdekat dengan Desa Kepuharjo dengan akses yang cukup mudah. Hal tersebut menjadikan Desa Wukirsari sebagai desa penyangga dari Desa Kepuharjo sebagai desa terdampak. Berbeda apabila dinyatakan radius aman di atas 15 km, maka barak pengungsian yang ada di Wukirsari dinyatakan tidak layak, sehingga kerjasama meluas antar kecamatan, yaitu dengan Kecamatan Ngemplak tepatnya di Desa Bimomartani. Hal-hal yang dilakukan dalam proses kerjasama antar desa ini meliputi pertemuan antar kepala desa dan camat, dan penandatanganan keputusan bersama MoU

Keempat, sistem peringatan bencana. Masyarakat sudah mulai mengandalkan informasi kebencanaan melalui sistem peringatan dini yang bersumber dari pos pengamatan Gunung Merapi (PGM). Sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS) merupakan sistem yang memberitahukan ketika akan timbul suatu bahaya atau bencana alam. Saat ini sistem yang ada tidak hanya menggunakan teknologi yang canggih, namun di Desa Kepuharjo masyarakat masih didukung dengan adanya penggunaan kentongan untuk memberikan isyarat apabila Gunung Merapi mengisyaratkan gejala yang tidak normal.

Sistem peringatan dini perlu didukung dengan sistem komunikasi yang baik agar masyarakat mampu menerima dengan benar dan mengetahui secara tepat informasi kebencanaan yang diberikan melalui EWS. Pada dasarnya sistem peringatan dini harusnya merupakan peringatan kepada masyarakat

yang penyampaiannya mudah diterima oleh masyarakat. Peran pemuda banyak terlibat agar peringatan bencana mudah diterima oleh masyarakat. Karang Taruna, SKSB dan Rakom Gema Merapi banyak terlibat dalam masalah ini. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran SKSB sangat penting dalam pemantauan dan penyebaran peringatan. Proses kerjasama telah terpadu dengan pos PGM dan BPPTK. Sementara Rakom Gema Merapi mengambil celah melalui saluran radio yang mempunyai cakupan lebih luas dan lebih banyak pendengarnya. Sedangkan karang taruna mengambil peran koordinasi.

Kelima, mobilisasi sumberdaya. Mobilisasi sumberdaya berkaitan dengan upaya pemuda dalam mengerahkan kapasitas yang dimiliki baik dari aspek penyediaan sarana prasarana, perlengkapan dan pendanaan serta sumber daya manusia. Dilihat dari segi materi dan non materi, keberadaan sekolah di tengah-tengah masyarakat juga bisa memberikan nilai lebih dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kerjasama yang melibatkan institusi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana. Mobilisasi sumberdaya juga mencakup penyediaan peralatan untuk evakuasi dan kebutuhan dasar logistik pertolongan pertama dan peringatan bencana. Kelompok-kelompok pemuda yang aktif dalam pengurangan risiko bencana juga memudahkan dalam mobilisasi sumberdaya.

Berdasarkan indikator kelima yaitu memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat dapat disimpulkan bahwa peran pemuda berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Desa Kepuharjo dengan dampak positif,

yaitu (1). Terciptanya pemahaman dan ketepatan sikap tindakan dalam menciptakan kesiapsiagaan, (2). Terciptanya program kebijakan yang mengedepankan kesiapsiagaan, (3). Terciptanya alur sistem peringatan yang efektif, (4). Terciptanya kerjasama antar daerah dalam perencanaan kedaruratan, dan (5). Terciptanya kemudahan dalam mobilisasi sumberdaya.

Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo

Indikator ketahanan wilayah terhadap bencana yang terdapat pada HFA yang dipadukan dengan peran pemuda memberikan kesimpulan bahwa terdapat implikasi positif dari peran pemuda Kepuharjo dalam pengurangan risiko bencana terhadap ketahanan wilayah Kepuharjo. Dari kelima indikator, implikasi positif tercipta pada 4 (empat) indikator, yaitu (1). Menjadikan PRB sebagai prioritas lokal dan nasional, (2). Mengidentifikasi risiko-risiko bencana, (3). Membangun budaya keselamatan dan ketahanan, serta (4). Memperkuat kesiapsiagaan. Sedangkan pada indikator mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar belum terdapat implikasi peran

pemuda dalam pengurangan risiko bencana terhadap ketahanan wilayah.

Bangunan ketahanan wilayah Desa Kepuharjo yang tercipta juga dapat dilihat dengan menggunakan diagram manajemen bencana di mana pemuda Kepuharjo telah berperan di empat fase manajemen bencana, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan, (lihat tabel 2).

Tabel 2 menjelaskan hubungan 4 (empat) fase dalam diagram manajemen bencana terhadap peran pemuda Kepuharjo yang berpengaruh menciptakan bangunan ketahanan wilayah Desa Kepuharjo. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda secara kolaboratif ini bukan dalam tafsiran menghindari bencana, tetapi menjadikan bencana sebagai normalitas kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan bencana sebagai bagian dari kehidupan yang harus jalani, maka masyarakat dapat meminimalisasi kerugian yang terjadi akibat bencana tersebut dan secara bersamaan mampu membangun kembali dari keterpurukan yang di akibatkan oleh bencana. Ni'am dan Ardianto (2013) menyebutkan bahwa inilah salah satu pemaknaan penting dari prinsip hidup selaras dengan bencana (*living harmony with disasters*), dari makna inilah makna resiliensi atau ketahanan terhadap bencana akan menemukan bukti-bukti yang relevan dan konkret.

Bangunan ketahanan wilayah Kepuharjo yang telah tercipta melalui peran dari pemuda dapat digambarkan melalui matrik hubungan peran pemuda di setiap fase manajemen bencana dengan melakukan pembobotan di setiap peran yang dilakukan. Peneliti melakukan analisis pembobotan ini disesuaikan dengan aktivitas peran yang dilakukan sejauh mana berpengaruh terhadap keadaan yang tercipta di masyarakat Desa

Tabel 2
Peran Pemuda Kepuharjo Pada Fase Manajemen Bencana

Fase	Peran yang paling berpengaruh
Mitigasi/ <i>Mitigation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Pelatihan - Radio Komunitas
Kesiapsiagaan/ <i>Preparation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Simulasi - Pemetaan Partisipatif - Pemantauan - Komunikasi - Radio Komunitas
Respon/ <i>Response</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan - Komunikasi - Radio Komunitas
Pemulihan/ <i>Recovery</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Radio Komunitas - Konservasi

Sumber: Analisis, 2016

Tabel 3
Matrik Hubungan Peran Pemuda Berdasarkan Fase Manajemen Bencana

Peran Fase	Sosialisasi	Pelatihan	Simulasi	Pemetaan	Pemantauan	Komunikasi	Rakom	Konservasi
Mitigasi	2	2	1	1	1	1	2	1
Kesiapsiagaan	1	1	2	2	2	2	2	1
Respon	0	0	0	0	2	2	2	0
Pemulihan	0	1	0	0	0	1	2	2

Sumber: Analisis, 2016

Keterangan:

0	Tidak berpegaruh/tidak tahan
1	Berpegaruh/agak tahan
2	Sangat berpegaruh/tahan

Kepuharjo terkait dengan pengurangan risiko bencana. Matrik hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Ketahanan wilayah merupakan sebuah budaya yang harus dibangun terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam membentuk bangunan budaya ketahanan ini, pemuda perlu menjalankan perannya pada 4 (empat) tahapan pembangunan berkelanjutan, yaitu *Plan, Do, Check, dan Action*. Dalam konteks Kepuharjo, pemuda telah memainkan perannya secara maksimal pada tahapan *plan* dan *do*. Pada tahapan *check* secara umum difasilitasi oleh pihak pemerintah desa atau kabupaten dengan melakukan simulasi. Kemudian pada tahapan yang terakhir yaitu *action* atau tindakan evaluasi dari temuan yang kurang sesuai, belum tercipta di Kepuharjo. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya dukungan terutama moral dan spiritual dalam memaksimalkan peran pemuda baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, masih adanya tumpang tindih regulasi terkait penataan kawasan rawan bencana Merapi, dan masih monotonnya program yang dilakukan sehingga menciptakan suasana bosan di masyarakat dan terkesan bersifat hanya pemberian stimulus sesaat.

Tahapan membangun secara berkelanjutan memperlihatkan bahwa pemuda terlibat aksi-aksi pengurangan risiko bencana secara kolaboratif sesuai peranan yang tepat bagi mereka. Pemuda tidak mungkin dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial yang kompleks, termasuk dalam pengurangan risiko bencana, sendirian. Mereka harus bekerja secara kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat lainnya. Dengan begitu, tidak ada klaim bahwa satu pihak lebih dipentingkan dalam persoalan kebencanaan. Dari kegiatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki kapasitas dan kemampuannya sendiri dalam merespons pengurangan risiko bencana, sehingga budaya ketahanan dapat terjaga.

Berdasarkan penjelasan terkait pencapaian indikator HFA yang sejalan dengan pencapaian dalam tahapan manajemen bencana dan pembangunan berkelanjutan, peneliti menyimpulkan bahwa ketahanan wilayah Desa Kepuharjo masuk ke dalam level 4, yaitu capaian yang cukup berarti telah diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional.

Tabel 4
Matrik Hubungan Peran Pemuda Dan Implikasi Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo

<i>Implikasi Indikator</i>	Aspek Ideologi	Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosbud	Aspek Hankam
Prioritas lokal	- Sosialisasi dan pelatihan	- Penyusunan dokumen kontinjensi (SOP)	- Sosialisasi dan pelatihan	- Penyusunan dokumen kontinjensi (SOP) - Sosialisasi dan pelatihan	- Penyusunan dokumen kontinjensi (SOP) - Sosialisasi dan pelatihan
Identifikasi risiko	- Sosialisasi dan pelatihan	- Sosialisasi dan pelatihan	- Sosialisasi dan pelatihan	- Sosialisasi dan pelatihan - Pemetaan partisipatif - Pemantauan - Komunikasi	- Sosialisasi dan pelatihan - Komunikasi - Pemantauan
Budaya Keselamatan	- Pendidikan - Pelatihan - Sekolah Siaga Bencana - Radio Komunitas	- Pendidikan - Pelatihan	- Pendidikan - Pelatihan	- Pendidikan - Pelatihan - Sekolah Siaga Bencana - Radio Komunitas	- Pendidikan - Pelatihan - Sekolah Siaga Bencana
Mengurangi faktor risiko mendasar	-	-	-	- Konservasi - Pelestarian	-
Memperkuat kesiapsiagaan	- Pelatihan - Desa Tangguh Bencana - Sekolah Siaga Bencana	- Pelatihan - Desa Tangguh Bencana - <i>Sister village</i>	- Pelatihan	- Pelatihan - Desa Tangguh Bencana - Sekolah Siaga Bencana - <i>Sister village</i> - <i>Sister school</i> - Pemantauan	- Pelatihan - Desa Tangguh Bencana - Sekolah Siaga Bencana - <i>Sister village</i> - <i>Sister school</i> - Pemantauan

Sumber : Analisis,2016

Pemaparan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kelima indikator prioritas aksi dalam implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Desa Kepuharjo sejalan dengan kelima prioritas unsur *Asta Gatra*. Prioritas utama dalam memulai membangun ketahanan wilayah adalah dimensi sosial sumberdaya manusia pada tingkat komunitas. Prioritas kedua adalah ketahanan sumberdaya manusia, baik fisik, organisasi dan ekonomi di tingkat komunitas. Prioritas ketiga adalah ketahanan sosial hukum, infrastruktur dan kelembagaan. Prioritas keempat adalah ketahanan fisik hukum tingkat komunitas. Prioritas kelima ketahanan adalah dimensi-dimensi selain tersebut diatas. Matrik hubungan peran pemuda dan implikasinya

terhadap ketahanan wilayah dapat dilihat pada tabel 4.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, pemuda telah berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kepuharjo melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan elemen masyarakat lain. Kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan PRB, pemetaan partisipatif, pemantauan dan komunikasi, simulasi atau gladi lapangan, radio komunitas, serta konservasi dan pelestarian. Dari keenam kegiatan yang dilakukan yang paling berpengaruh adalah radio komunitas.

Kedua, peran yang dilakukan oleh pemuda dalam pengurangan risiko bencana memiliki implikasi terhadap ketahanan wilayah Desa Kepuharjo dengan kata lain ketahanan wilayah Kepuharjo telah tercipta. Dari kelima indikator HFA, telah tercipta implikasi pada 4 (empat) indikator, yaitu (1). Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas lokal dan nasional dengan dasar kelembagaan yang kuat, (2). Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana, (3). Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat, dan (4). Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat. Sedangkan pada indikator mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar, belum tercipta implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah Desa Kepuharjo masuk ke dalam level 4, yaitu capaian yang cukup berarti telah diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I., 2008, *Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam, Working Papers in Interdisciplinary Studies No. 1*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

BNPB, 2010, *Laporan Tanggap Darurat Gunung Merapi 2010*, Yogyakarta: Posko BNPB.

BPPTK, 2011, *Laporan Pemantauan Aktivitas Gunung Merapi Januari, 2011*, Yogyakarta: BPPTK.

LIPI-UNESCO/ISDR, 2007, *Pengembangan Framework Untuk Mengukur Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap*

Bencana Alam, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Ni'am, L. dan Ardianto, H. T., 2013, "Kolaborasi Menuju Resiliensi: Pengalaman Pemuda Ende dalam Pengurangan Risiko Bencana", *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 2 No. 1.

Nugrahani, T. S., 2011, *Dampak Erupsi Merapi dan Kemiskinan di Kecamatan Cangkringan*, Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.

Ride, A. & Bretherton, D., 2011, *Community Resilience in Natural Disaster*, New York: Palgrave Macmillan.

Shofa, Abd Muid Aris, 2016, "Peran Pemuda dalam Pendampingan Mahasiswa Difabel dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi di Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 22 No. 2: 199-216.

Sirimorok, N., 2010, *Membangun Kesadaran Kritis: Kisah Pembelajaran Partisipatif Orang Muda*, Yogyakarta: INSIST Press.

Sirimorok, N. dan Puthut EA, 2010, *Bencana Ketidakadilan: Refleksi Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia*, Karanganyar: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan.

Sudibyakto, 2011, *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana?*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sudibyakto, dkk, 2009, *International Seminar on Disaster: Theory, Research and Policy. Proseding Internasional Seminar*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Widyanta, AB., 2010, *Gelombang Erupsi Merapi, Pengungsi dan Jejaring Posko Mandiri: Best Practice Penanggulangan*

Bencana ala Dusun Kadisoka, <https://www.academia.edu/4890191/> diakses pada 5 Maret 2016.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009
Tentang Kepemudaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung
Merapi.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun
2012 Tentang Panduan Penilaian
Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana

Internet

geospasial.bnpb.go.id